

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Klientelisme merupakan suatu fenomena yang masih melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia yang secara khusus lekat dengan konteks elektoral dan kedaerahan. Melihat kembali pada pemikiran mendasarnya, klientelisme sebagai perilaku koruptif dan merupakan bentuk transaksi yang berjalan dua sisi, yaitu *supply* dan *demand*. Kemudian adanya *demand* dari warga atau pemilih merupakan konsekuensi logis dari minimnya kemampuan warga untuk memastikan agenda kesejahteraannya ada dalam agenda politik.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, klientelisme memang bukan menjadi karakteristik yang hanya terjadi di sistem pemerintahan demokrasi. Namun, klientelisme menemukan tempatnya dalam dinamika demokrasi. Klientelisme menjadi persoalan yang terus menguat dalam diskursus politik, terutama karena gelombang demokratisasi yang terjadi hingga kini. Entitas politik yang berada di masa transisi demokrasi dapat dikatakan menjadi paling rentan terhadap praktik-praktik patron-klien. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan struktural yang sedang terjadi, tetapi juga karena adanya potensi distorsi dalam perubahan struktural tersebut.

---

<sup>1</sup>Nur Ramadhan, M. & Berlianto, J. D. Klientelisme Sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. 2019. 5(1): 2615-7977. 169-180.

Klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para pegiat kampanye atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi tersebut menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang, atau uang tunai kepada para pemilih baik individual maupun kelompok-kelompok kecil.<sup>2</sup> Dalam salah satu artikelnya, Berenschot<sup>3</sup> mengkaji dan mendalami indikasi dari seberapa jauh hubungan patron-klien masih menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia, terutama pada tingkat daerah.

Dalam perjalanan pilkada (pemilihan kepala daerah) sampai saat ini, praktik politik klientelistik masih sangat kental mewarnai dinamika politik di daerah. Praktik ini biasanya ditandai adanya penguasaan sumber daya politik oleh minoritas elite, terutama elite lokal<sup>4</sup>. Pada saat yang sama tampak ketergantungan klien terhadap sumberdaya tersebut. Alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya publik kemudian

---

<sup>2</sup>Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>3</sup>Berenschot, W. The Political Economy of Clientelism: a Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*. 2018. 51(12), 1563-1593.

<sup>4</sup>Ada banyak kelompok elite yang menjadi aktor dalam proses perebutan kekuasaan didaerah. Dalam sistem politik yang desentralistik, kata Vedi R. Hadiz, dalam bukunya “*Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*”, persaingan kekuasaan didaerah berada di dalam sebuah sistem, dimana parlemen dan partai-partai politik menjadi wadah persaingan sosial dan politik. Didalam sistem yang demikian, elite-elite lokal yang terdiri dari tokoh-tokoh daerah, para birokrat-politik, dan para pengusaha mungkin saja muncul sebagai suatu kekuatan politik. Ada beberapa elite lokal, baik secara langsung dan tidak langsung, terjun dalam perebutan kekuasaan di daerah. Diantara kelompok elite tersebut adalah elite birokrasi (pemerintah), elite parpol, elite ekonomi, elite agama dan elite masyarakat lainnya. Masing-masing elite menjadi *play-maker* dalam memperebutkan kekuasaan di daerah. Dirujuk dalam buku Halim, A. 2014. “Politik lokal: pola, aktor & alur dramatikalnya: perspektif teori *Powercube*, modal dan panggung”. *Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B)*.

lebih merupakan bentuk pertukaran antara kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien.

Pada masa pemilihan umum, kebanyakan calon membentuk organisasi non-partai untuk menjaring suara yang dikenal dengan sebutan “tim sukses” yang kadang memanfaatkan kader-kader partai namun lebih sering bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat dan para warga yang tidak terafiliasi dengan partai.<sup>5</sup> Tentu saja kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses demokratisasi di Indonesia saat ini. Sebab demokratisasi dibayangkan bukan hanya sebagai proses instalasi institusi mekanisme dan prosedur demokratis formal melainkan juga diharapkan akan menjadi ruang penting bagi upaya mendorong pola-pola hubungan yang lebih demokratis dalam urusan publik.<sup>6</sup> Idealnya, dalam suasana yang demokratis, warga negara bisa melakukan kontrol terhadap urusan-urusan publik tanpa ada lagi diskriminasi dan praktik-praktik klientelisme akan tergerus. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi lebih jauh bagaimana pengaruh proses dan praktik klientelisme dalam pemilihan kepala daerah.

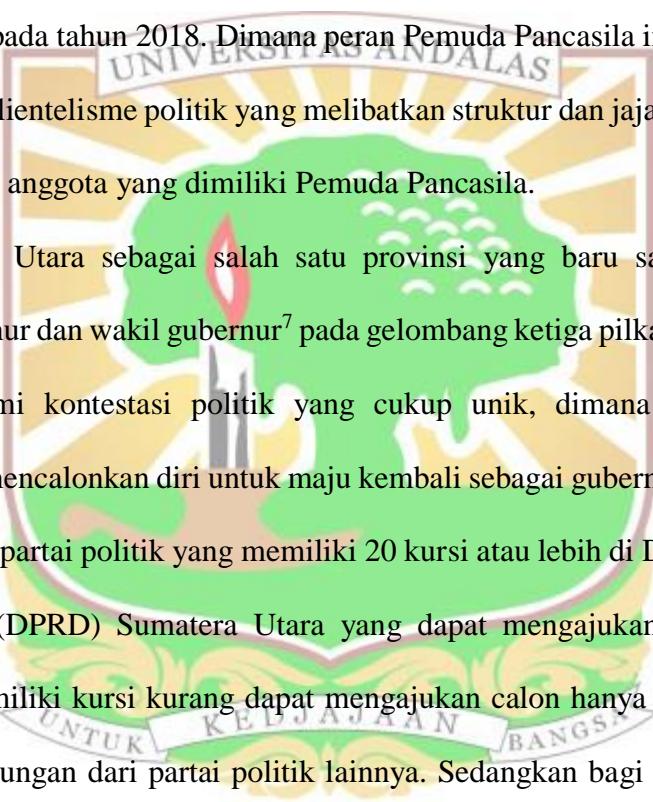
Umumnya, klientelisme sering melibatkan jaringan informal yang digambarkan melalui jaringan kekerabatan, relasi keluarga yang dimiliki sebagai sumberdaya dan modal dalam bentuk pemilih, sampai kepada pemanfaatan jaringan organisasi yang memiliki basis massa yang besar. Didalam penelitian ini, peneliti ingin melihat kepada

---

<sup>5</sup>Op.cit hlm 10

<sup>6</sup>Hasrul Hanif. “Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia”. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3). 2009. 327-351.

keterlibatan Pemuda Pancasila dalam upaya pemenangan pasangan calon gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018. Dimana peran Pemuda Pancasila ini dapat dianalisis melalui praktik klientelisme politik yang melibatkan struktur dan jajaran kepengurusan serta basis massa anggota yang dimiliki Pemuda Pancasila.



Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang baru saja melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur<sup>7</sup> pada gelombang ketiga pilkada serentak tahun 2018<sup>8</sup>, mengalami kontestasi politik yang cukup unik, dimana calon petahana<sup>9</sup> gubernur gagal mencalonkan diri untuk maju kembali sebagai gubernur.<sup>10</sup> Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Sedangkan bagi calon independen

---

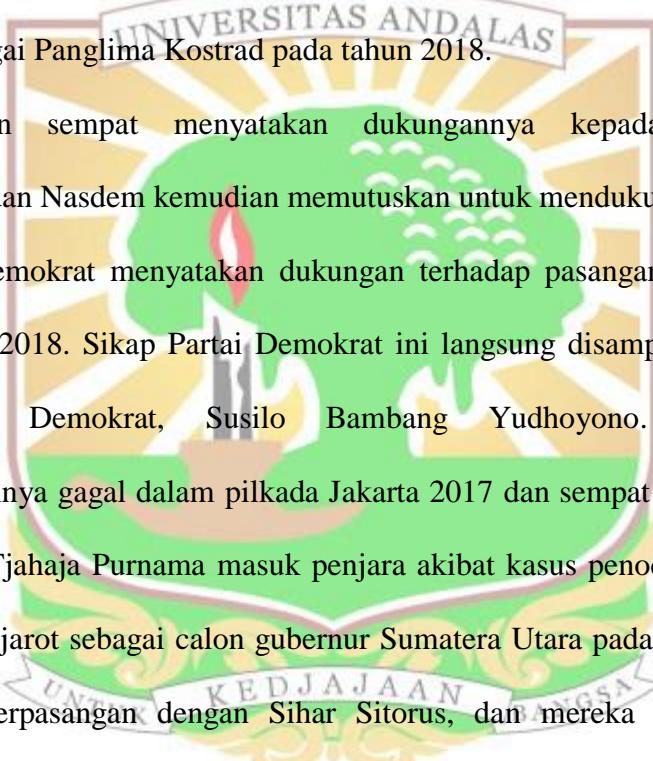
<sup>7</sup>Dirujuk kepada penamaan sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

<sup>8</sup>Pilkada serentak telah dilakukan dalam tiga gelombang, yakni gelombang pertama dilakukan pada Desember 2015, kemudian gelombang kedua pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018. Dirujuk pada <http://www.antaranews.com/berita/460818/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027>. Diakses pada 08 Oktober 2018

<sup>9</sup>Petahana merupakan pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009 di kolom bahasa Kompas, sebagai padanan istilah dalam bahasa Inggris incumbent. Dirujuk dalam <https://kbki.kemendikbud.go.id/entri/petahana>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019.

<sup>10</sup>Penyebab gagalnya pencalonan Tengku Erry Nuradi sebagai petahana dilatarbelakangi oleh kurangnya dukungan partai politik untuk mencapai syarat 20 persen jumlah kursi di DPRD. Menjelang pencalonan, satu-satu partai mencabut dukungannya dengan alasan masing-masing. Mengingat gubernur Sumatera Utara yang menjabat sejak tahun 2016 ini adalah ketua DPW Nasdem Sumut, partai politik pengusung sebelumnya tetap menganggap elektabilitas Tengku Erry tidak cukup untuk memenangkan kontestasi pilkada di Sumut. Hal ini disampaikan langsung oleh Wasekjen Partai Golkar ketika menarik dukungan terhadap pencalonan Tengku Erry Nuradi sebagai calon gubernur petahana, kemudian disusul oleh partai-partai pengusung sebelumnya untuk ikut serta menarik dukungan masing-masing. Fenomena tersebut direspon langsung oleh Partai Nasdem dan harus berlapang dada untuk tidak mencalonkan kadernya kembali dan memberikan dukungan terhadap pasangan calon lain.

membutuhkan 764.578 suara minimal atau 6,5% jumlah pemilih di Sumatera Utara. Dukungan harus ditunjukkan dalam bentuk fotokopi KTP yang akan diverifikasi oleh KPU. Namun, tidak ada calon yang akan maju secara independen dalam pilkada ini. Edy Rahmayadi pertama-tama mendaftar di Partai Hanura pada Agustus 2017. Partai Gerindra, PKS dan PAN lalu menyatakan dukungan mereka pada akhir Desember 2017. Untuk turut serta dalam pemilu ini, Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad pada tahun 2018.



Walaupun sempat menyatakan dukungannya kepada Tengku Erry Nuradi, Golkar dan Nasdem kemudian memutuskan untuk mendukung pasangan Edy-Musa. Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap pasangan Edy-Musa pada tanggal 11 Mei 2018. Sikap Partai Demokrat ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Djarot Saiful Hidayat sebelumnya gagal dalam pilkada Jakarta 2017 dan sempat menjadi gubernur setelah Basuki Tjahaja Purnama masuk penjara akibat kasus penodaan agama. PDIP menyatakan Djarot sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada tanggal 5 Januari 2018. Djarot berpasangan dengan Sihar Sitorus, dan mereka berdua kemudian mendapatkan dukungan dari PPP, sehingga mereka memenuhi syarat untuk maju.

**Tabel 1.1**  
**Peserta Pilkada Sumatera Utara 2018**

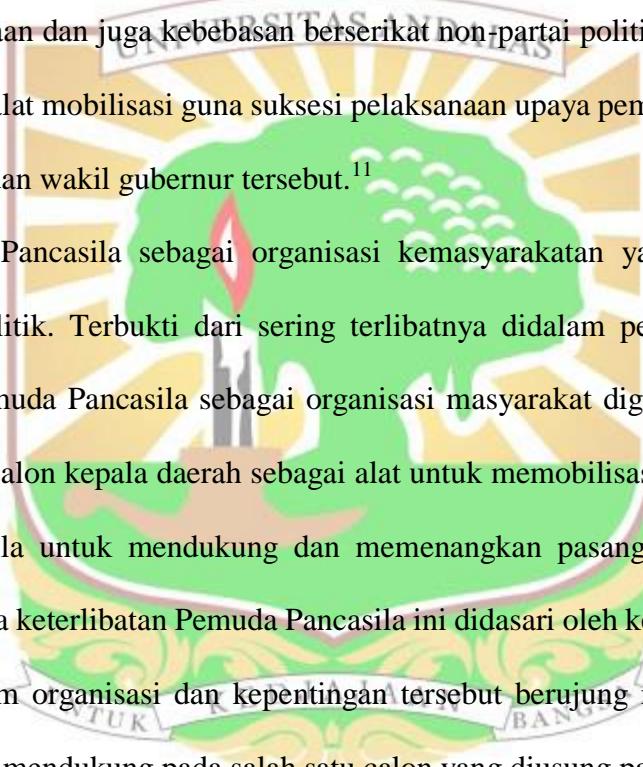
No. Urut	Nama calon gubernur dan wakil gubernur	Partai pengusung dan pendukung	Jumlah kursi di DPRD
1	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah	- Gerindra - PKS - PAN - Golkar - Nasdem Hanura - PBB - Demokrat - PKB - Perindo - Partai Garuda	77 kursi
2	Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus	- PDI P - PPP - PKPI - PSI	23 kursi

*Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber*

Melihat apa yang tertulis dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pasangan calon Edy-Musa memiliki koalisi partai pengusung dan pendukung yang memiliki jumlah kursi di DPRD lebih dari setengah jumlah kursi keseluruhan. Dengan realitas tersebut, setidaknya proses mobilisasi massa dan pemilih masing-masing partai menjadi basis utama dalam upaya pemenangan Edy-Musa. Banyaknya partai pengusung dalam komposisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara juga dapat menggerakkan mesin partai sampai ke tingkat paling terendah untuk tujuan pemenangan.

Akan tetapi, pada proses pemenangan pasangan Edy-Musa tidak hanya berasal dari partai politik saja. Mengingat kompleksitas masyarakat Sumatera Utara, dan

banyaknya jenis kelompok kepentingan yang hadir dalam pusaran pilkada, memberikan beberapa unsur pendukung diluar dari partai politik. Salah satunya adalah dukungan yang didapat melalui organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan ormas mengakibatkan partai politik tidak lagi sebagai kekuatan tunggal untuk memenangkan pasangan calon Edy-Musa. Kekuatan non-partai seperti ormas agama, ormas etnis, ormas kepemudaan dan juga kebebasan berserikat non-partai politik seperti LSM dan NGO dijadikan alat mobilisasi guna suksesi pelaksanaan upaya pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.<sup>11</sup>



Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan yang sering terlibat dalam dunia politik. Terbukti dari sering terlibatnya didalam pemilu dan pilkada. Keterlibatan Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat digunakan oleh partai politik ataupun calon kepala daerah sebagai alat untuk memobilisasi massa dari kader Pemuda Pancasila untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon tersebut. Tidak jarang juga keterlibatan Pemuda Pancasila ini didasari oleh kepentingan dari elit yang ada didalam organisasi dan kepentingan tersebut berujung menjadi keputusan organisasi untuk mendukung pada salah satu calon yang diusung partai tertentu.

Sebagai salah satu ormas terbesar di Sumatera Utara, Pemuda Pancasila (PP) menyatakan dukungan kepada pasangan calon Edy-Musa dalam pilkada Sumut 2018. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Khodrat Shah. Menurutnya, Pemuda

---

<sup>11</sup>Fariz, M. W. "Politik Balas Budi: Hubungan Pemuda Pancasila dan Demokrat dalam Mobilisasi Massa Pada Pilkada Surabaya tahun 2015". *Jurnal Politik Muda*, 6(2). 2017. 163-170.

Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemenangan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018. Sehingga penting bagi Pemuda Pancasila untuk mengambil momentum menentukan nasib Sumatera Utara melalui kontestasi pemilihan gubernur ini.<sup>12</sup>

“.....Untuk itu, saya (Khodrat Shah) sudah menginstruksikan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila di Sumut, sampai ke pelosok-pelosok, untuk terus bekerja pro-aktif dalam memenangkan pasangan calon Nomor 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah<sup>13</sup>”

Dukungan Pemuda Pancasila kepada pasangan Edy-Musa bukan tanpa alasan. Selain karena sosok Edy Rahmayadi yang dinilai tegas dan mampu merubah Sumatera Utara menjadi lebih sejahtera dan bermartabat, sementara Musa Rajekshah adalah bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila. Walaupun secara kekerabatan, ketua MPW Pemuda Pancasila (Khodrat Shah) dan calon wakil gubernur yang diusung merupakan hubungan paman dan keponakan, tapi secara gamblang dukungan yang diberikan murni atas objektivitas Pemuda Pancasila yang menilai bahwa Musa Rajekshah adalah salah satu kader terbaik dan sedang menduduki jabatan Ketua Bidang Pengusaha Pemuda Pancasila.<sup>14</sup>

Menanggapi instruksi yang diberikan oleh ketua MPW, pengurus Pemuda Pancasila di tingkat kabupaten merespon hal tersebut. Salah satu kabupaten yang

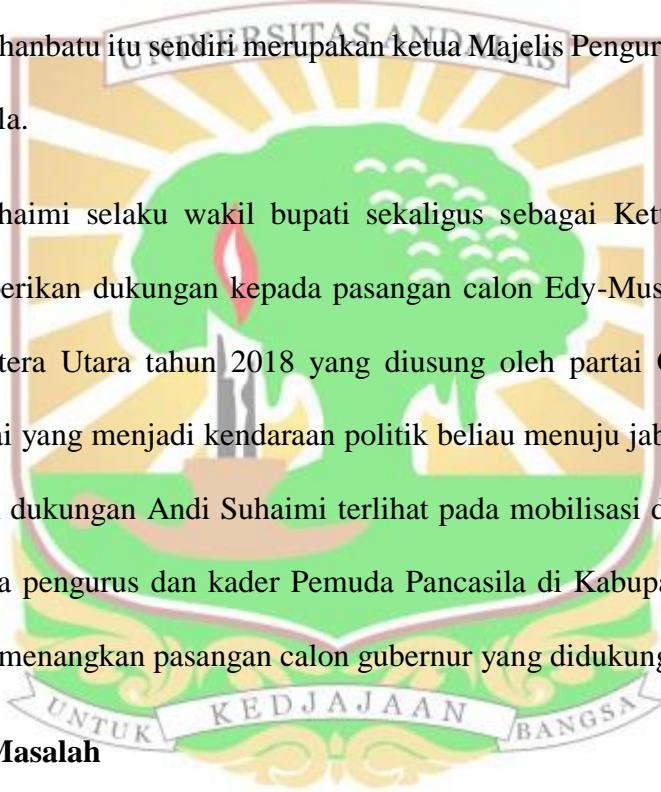
---

<sup>12</sup><https://news.okezone.com/read/2018/02/26/340/1864985/ormas-pemuda-pancasila-deklarasi-dukung-edy-rahmayadi-musa-rajekshah>. Diakses pada tanggal 10 November 2018

<sup>13</sup>Pernyataan deklarasi dukungan yang disampaikan MPW Pemuda Pancasila kepada pasangan Edy-Musa kepada awak media. Keputusan diambil setelah jajaran pengurus Pemuda Pancasila dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di hotel Grand Mercure, Medan pada Sabtu 24 Februari 2018.

<sup>14</sup>Ibid.

memperlihatkan antusiasmenya terhadap instruksi itu adalah pengurus Pemuda Pancasila di kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dapat dilihat dari masa-masa saat kampanye yang dilaksanakan.<sup>15</sup> Sebagian besar peserta kampanye dihadiri oleh kader bahkan partisian Pemuda Pancasila, dan yang paling menonjol yaitu Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu itu sendiri merupakan ketua Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila.



Andi Suhaimi selaku wakil bupati sekaligus sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila memberikan dukungan kepada pasangan calon Edy-Musa pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang diusung oleh partai Golkar yang juga merupakan partai yang menjadi kendaraan politik beliau menuju jabatan wakil bupati tersebut. Bentuk dukungan Andi Suhaimi terlihat pada mobilisasi dan instruksi yang diberikan kepada pengurus dan kader Pemuda Pancasila di Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya memenangkan pasangan calon gubernur yang didukung.<sup>16</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018, menghasilkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah sebagai pemenang kontestasi. Perolehan suara di masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi,

---

<sup>15</sup>Hal ini berdasarkan pengalaman peneliti secara langsung, sewaktu proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Edy Rahmayadi di kabupaten Labuhanbatu. Berjalannya kampanye ketika itu tidak bisa dilepaskan dari peran Pemuda Pancasila sebagai salah satu kelompok yang siap memenangkan pasangan calon tersebut. Mobilisasi massa kampanye didominasi oleh kader, bahkan setiap kader pun ikut serta mengajak masyarakat setempat untuk menghadiri kampanye itu.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sholeh Rambe, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Pangkatan, 24 Juni 2018.

disebabkan adanya polarisasi berbagai elemen kelompok masyarakat, mulai dari tim pemenangan, massa partai politik sampai dengan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta mengambil peran dalam ranah kontestasi pemenangan.

Suara yang didapatkan pasangan Edy-Musa di kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu dari beberapa daerah yang menjadi lumbung suara dan basis massa pemilih yang selama ini telah menjadi daerah pertarungan masing-masing calon, menorehkan angka 135.109 suara dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap) keseluruhan 276.160. Sedangkan pasangan calon Djarot-Sihar hanya memperoleh 43.305 suara. Perolehan suara yang memiliki hasil sangat signifikan didapatkan pasangan calon nomor urut 1 di kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari keikutsertaan MPC Pemuda Pancasila dalam mewarnai konstelasi politik di daerah tersebut.

**Tabel 1.2**

**Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 Di Kabupaten Labuhanbatu**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Perolehan Suara (%)
1	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah	276.160	135.109 (75.73%)
2	Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus		43.305 (24,27%)

Sumber: *diolah oleh peneliti dari infopemilu.kpu.go.id*

Dari tabel perolehan suara di atas, peneliti berasumsi bahwa peran Andi Suhaimi sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila sekaligus wakil bupati, memiliki pengaruh dalam upaya memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut 1. Secara

tidak langsung, orang nomor dua di kabupaten tersebut telah melakukan mobilisasi vertikal kepada jajaran kader Pemuda Pancasila yang berada di bawah kepemimpinannya. Pengaruh dan otoritas yang dimilikinya memberikan keuntungan tersendiri terhadap pemenangan.

Sebelumnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhanbatu, pasangan Pangonal Harahap dan Andi Suhaimi Dalimunthe memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan adanya campur tangan dari Pemuda Pancasila.<sup>17</sup> Hal ini menjadikan pembuktian bahwa Pemuda Pancasila memiliki andil yang cukup dipertimbangkan dan pusaran politik di daerah tersebut. Kemudian faktor mobilisasi yang dilakukan kader-kader Pemuda Pancasila juga sangat berpengaruh besar dengan cara *soft campaign* dikalangan masyarakat.

Akan tetapi pada persoalan menetapkan pilihan pada calon gubernur, antara bupati dan wakil bupati memiliki preferensi politik yang berbeda. Dimana Pangonal Harahap selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu mendukung pasangan calon Djarot-Sihar yang notabene diusung partai PDI-P selaku partai yang mengusungnya menuju jabatan bupati ada pemilihan sebelumnya. Bahkan bupati tersebut menjadi salah satu tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Sedangkan wakil bupati seperti paparan

---

<sup>17</sup>Dapat dilihat dalam Skripsi mahasiswa Universitas Sumatera Utara:  
Muhammad Iqbal. 2017. "Peran Pemuda Pancasila dalam Mendukung Pencalonan Kepala Daerah (Studi tentang, Kemenangan Pangonal Harahap dan Andi suhaimi Dalimunthe Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2015)."

di atas, malah mendukung pasangan calon nomor urut 1.<sup>18</sup> Kenyataan ini menjadikan pertarungan pilihan politik antar pemegang kekuasaan di ranah lokal.

Penelitian mengenai keterlibatan Pemuda Pancasila dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah sudah banyak dilakukan, salah satunya studi yang dilakukan oleh Moch. Wildan Fariz, yang berjudul *Politik Balas Budi: Hubungan Pemuda Pancasila dengan Partai Demokrat Dalam Mobilisasi Massa pada Pilkada Surabaya Tahun 2015*.<sup>19</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila memberikan dukungan kepada pasangan calon walikota Rasiyo-Lucy sebagai lawan dari pasangan Risma-Bambang. Dukungan yang diberikan bukan tanpa alasan, dimana Ketua MPW Jawa Timur memiliki kepentingan terhadap partai Demokrat yang akan menjadi kendaraannya dalam pencalonan sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Pilkada Surabaya Tahun 2015, hubungan antara Andi Suhaimi dengan Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu dibalut dengan perilaku klientelisme politik yang terlihat dalam pemberian dukungan dan memenangkan pasangan calon gubernur. Adanya keuntungan yang didapat secara kausalitas baik dari calon gubernur dan Pemuda Pancasila itu sendiri, mencirikan pola yang terbangun dalam konsep patronase-klien. Posisi klien yang dilakukan Pemuda

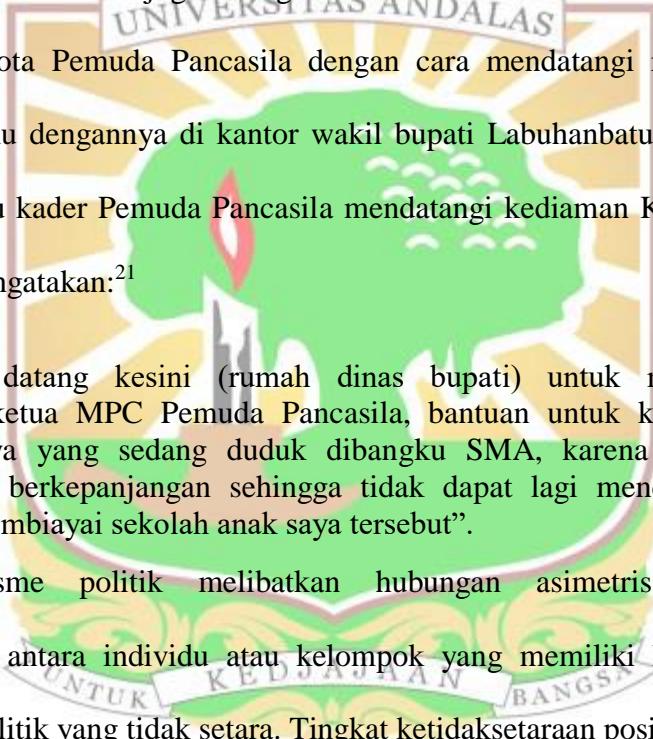
---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Kamal Ilham, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, 24 Juni 2018

<sup>19</sup>Fariz, M.W. Politik Balas Budi: Hubungan Pemuda Pancasila dengan Partai Demokrat dalam Mobilisasi Massa Pada Pilkada Surabaya Tahun 2015. *Jurnal Politik Muda*, 6(2). 2017. 163-170.

Pancasila mengharapkan akan imbalan atau “derma” pada setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pemenangan. Baik itu imbalan berupa materi, janji-janji untuk mengisi suatu jabatan strategis maupun imbalan berupa jasa yang didapatkan dari patron.<sup>20</sup>

Pemberian bantuan juga sering kali dilakukan oleh Ketua MPC PP kepada kader dan anggota Pemuda Pancasila dengan cara mendatangi rumah dinas atau langsung bertemu dengannya di kantor wakil bupati Labuhanbatu. Amrullah Sirait, selaku salah satu kader Pemuda Pancasila mendatangi kediaman Ketua MPC selaku wakil bupati mengatakan:<sup>21</sup>

“Bapak datang kesini (rumah dinas bupati) untuk meminta bantuan kepada ketua MPC Pemuda Pancasila, bantuan untuk kelanjutan sekolah anak saya yang sedang duduk dibangku SMA, karena saya mengalami penyakit berkepanjangan sehingga tidak dapat lagi mencari nafkah lebih untuk membiayai sekolah anak saya tersebut”.

Klientelisme politik melibatkan hubungan asimetris namun saling menguntungkan antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosio-ekonomi atau politik yang tidak setara. Tingkat ketidaksetaraan posisi mitra dalam hal asimetris ini dapat bervariasi dari kasus ke kasus dan berkurang karena sistem politik, demokrasi dan sumberdaya lebih banyak didistribusikan. Setidaknya klientelisme mengandung tiga hal: *pertama*, bersifat kontingensi atau hubungan timbal balik, *kedua*,

---

<sup>20</sup>Hanif, Hasrul. "Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2009. 12.3: 327-351.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Amrullah Sirait, kader Pemuda Pancasila Ranting Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat. Dirumah dinas Bupati Labuhanbatu pada tanggal 18 Agustus 2019

hierarkis, ada penekanan pada relasi kekuasaan dan *ketiga*, aspek pengulangan, pertukaran klientelisme berlangsung terus menerus.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, perilaku klientelisme politik menggambarkan pola hubungan dua entitas yang ada lebih berwatak dualistik dibandingkan dualisme dan lebih mencerminkan sebuah pertukaran politik timbal-balik asimetris. Sebuah hubungan yang ditandai oleh pemberian sumberdaya ekonomi dan politik dari sang patron yang biasanya memiliki kekuasaan yang bersifat personal dan adanya pamrih loyalitas dan dukungan politik dari penerima keuntungan. Klientelisme politik dalam pengertian sederhana, dijelaskan sebagai distribusi keuntungan yang terseleksi kepada individu atau kelompok yang teridentifikasi secara jelas yang akan ditukar dengan dukungan politik dari penerimanya<sup>23</sup>. Kondisi yang terjadi pada pusaran arus politik yang diperankan berkenaan dengan realitas hubungan politisi, organisasi kemasyarakatan (dalam hal ini adalah Pemuda Pancasila) dan pasangan calon sebagai bentuk hadirnya klientelisme di tengah-tengah proses demokratisasi melalui pemilihan langsung.<sup>24</sup>

Hal demikian menggambarkan klientelisme tidak bisa menghapus segala aspek yang menimbulkannya. Seperti, klientelisme tidak hanya melibatkan keluarga, kerabat, teman, partisipan loyalis tapi klientelisme juga cenderung memanfaatkan partisipan sukarela tanpa adanya hubungan yang dapat menimbulkan mobilisasi partisipan.

---

<sup>22</sup>L. R. Andhika, “Bahaya Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak”. *Jurnal UNPAD*. 2017.

<sup>23</sup>Hasrul Hanif, loc.cit

<sup>24</sup>Eka Kurniasari Afandi. “Faksionalisasi Ormas Pemuda Pancasila Dalam Tim Sukses Prabowo-Hatta di Pilpres Tahun 2014”. *Jurnal Politik Muda*. 2016. Vol 5, No. 3.

Karena sosok figur panutan juga mempengaruhi orang untuk menjadi anggota tim kampanye secara sukarela. Disisi lain klientelisme dalam bentuk pertukaran dukungan yang sederhana untuk keuntungan tidak berbeda dengan patronase dan *vote buying*.

Hubungan klientalistik yang dibangun oleh Wakil Bupati Labuhanbatu kepada jaringan kader Pemuda Pancasila yang berada di bawah komandonya, terdapat pertukaran dalam bentuk distribusi keuntungan-keuntungan yang didapat. Sebagai ketua MPC, secara tidak langsung otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya menjadi modal utama dalam menggerakkan dan mengatur aktivitas kadernya. Selain kepada internal kader, dia juga dapat membangun jejaring menggunakan simbol-simbol Pemuda Pancasila guna meraih dukungan dan suara untuk pasangan calon yang didukung.

Dengan melihat fenomena yang terjadi, peneliti berasumsi bahwa adanya praktik klientelisme politik yang diperankan Pemuda Pancasila di Kabupaten Labuhanbatu dalam memenangkan pasangan calon Edy-Musa pada pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018. Dengan asumsi yang peneliti pahami sepanjang realitas tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah: “Bagaimana klientelisme politik yang terjadi dalam pilkada Sumatera Utara tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu? “

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat, mendeskripsikan dan menganalisis praktik klientelisme politik yang terjadi dalam pilkada Sumatera Utara tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu. Objek analisis dalam penelitian ini adalah praktik klientelisme politik antara Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu sebagai Ketua MPC dan Pemuda Pancasila dalam upaya pemenangan pasangan calon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

